



RENCANA KERJA PERUBAHAN

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM
TAHUN 2022



Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Tlp. (0541) 743364 Fax. 741035

Website : rsjdahm.kaltimprov.go.id // email : rsjdahm@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSJD Atma Husada Mahakam untuk tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan 2022 ini dibuat sebagai gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSJD Atma Husada Mahakam dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan kesehatan, terutama kesehatan jiwa di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu satu tahun kedepan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) RSJD Atma Husada Mahakam.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun kami harapkan dalam rangka perbaikan pembuatan Renja di tahun-tahun berikutnya.

Samarinda, 2022
Plt Direktur,
RSJD Atma Husada Mahakam



Syahrani S.Sos., M.Si
NIP. 196808101990031017

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-7
1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
1.4. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	II-12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-25
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-29
2.4. Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja RKPD Perubahan	II-38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	II-48
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III-55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	IV-56
4.1. Program dan Kegiatan	IV-56
BAB V PENUTUP	V-73
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja Perubahan	V-73
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaa	V-73
5.3. Rencana Tindak Lanjut	V-73

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur	20
Tabel 2.2 SPM/Standar Nasional mutu pelayanan rumah sakit	27
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur	28
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD perubahan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur	39
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur	49
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memperbaiki kemaslahatan umat manusia PBB telah mencanangkan *Sustainable Development Goals (SDG)* yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satu bidang dari SDG yang menjadi sorotan adalah bidang kesehatan, karena akan berdampak langsung pada kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan manusia 12 tahun ke depan yaitu pada tahun 2030.

Isu kesehatan jiwa merupakan salah satu target yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs), namun sering terabaikan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setidaknya satu dari empat orang di dunia pernah mengalami masalah kejiwaan sepanjang hidupnya. Sedang di Indonesia menurut Survei Global Health data tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, Hal ini berarti setidaknya ada satu dari sepuluh orang di negara ini sedang mengalami masalah kejiwaan. Membuat Indonesia menjadi negara dengan pengidap gangguan jiwa tertinggi di kawasan Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara dengan pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang terburuk. diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.

Rencana kerja perubahan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.1 Pengertian Ringkas Tentang Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah

Rencana kerja perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja

Perubahan OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja Perubahan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Rencana kerja perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;

3. Program dan Kegiatan dalam Rencana kerja perubahan harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;

Program dan Kegiatan dalam Rencana kerja perubahan dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.1.3 Keterkaitan Antara Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana kerja perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu penyusunan Rencana kerja perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, evaluasi pelaksanaan Rencana kerja perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan Rencana Kerja ini telah memperhatikan berbagai ketersediaan sumber daya yang ada, sehingga dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam berupaya seoptimal mungkin memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik sesuai kapasitas dan fungsinya.

1.1.4 Keterkaitan Antara Rencana kerja perubahan Dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Rencana kerja perubahan perangkat daerah disusun oleh pimpinan sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan akan

bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Rencana kerja perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 guna memberikan arah, kebijakan dan strategi yang hendak ditempuh selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.1.5 Keterkaitan Antara Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah Dengan Rencana kerja perubahan K/L

Perangkat Daerah mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL:

1. Daftar alokasi anggaran masing-masing unit eselon I yang dirinci per Perangkat Daerah dan sumber dananya berdasarkan Pagu Sementara yang ditandatangani oleh pejabat eselon I;
2. Peraturan perundangan mengenai struktur organisasi dan tugas fungsinya;
3. Standar Biaya;

Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKA-KL adalah menyusun Kertas Kerja RKA Perangkat Daerah yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui Dasar Alokasi Anggaran Satker
2. Berdasarkan Daftar alokasi anggaran per Satker dan sumber dana, satker menyusun rencana kerja dan anggarannya. Dasar alokasi anggaran tersebut berguna sebagai kontrol batas tertinggi alokasi anggaran satker pada akhir penyusunan KK RKA-KL.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta output kegiatan yang dihasilkan (sesuai karakteristik satker). Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari kegiatan generik atau teknis;
4. Peruntukan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya;

5. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui penggunaan komponen input/rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan dengan memanfaatkan penyediaan/penyajian makanan dan snack berbasis pangan lokal non beras, non terigu, sayuran dan buah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah;
6. Komponen input dalam rangka pencapaian output kegiatan yang dibatasi dalam hal Iklan layanan masyarakat kecuali untuk :
 - a. Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah. Contohnya, iklan mengenai: cara penanggulangan suatu penyakit menular, mendukung keberhasilan program pendidikan sembilan tahun, ajakan untuk bayar pajak; dan
 - b. Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Untuk biaya masukan/keluaran yang belum tercantum dalam PMK tentang Standar Biaya maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa PA/KPA bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan RKA-KL diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

7. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan

Perincian biaya Komponen Input dalam KK RKA-KL meliputi penyajian informasi item-item biaya yang akan dibelanjakan dalam rangka pencapaian output suatu kegiatan. Penyajian informasi dimaksud terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan (secara swakelola atau kontraktual). Langkah penyajian informasi tersebut sebagai berikut:

a. Swakelola

- 1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola, dirinci menurut jenis belanja yang sesuai. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non fisik

dan menggunakan jenis Belanja Barang. Contoh Kegiatan Diklat Teknis PNS.

2) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non fisik dan menggunakan jenis belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang. Contoh Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Kontraktual.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara kontraktual dimasukkan pada satu jenis belanja yang sesuai

8. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan Sebagai bentuk transparansi kegiatan pemerintahan, K/L diharapkan memberi informasi mengenai rencana pengadaan barang dan jasa melalui proses pelelangan. Kriteria pengadaan barang dan jasa melalui kontraktual yang perlu diinformasikan meliputi: nilai pengadaan barang dan jasa di atas 100 juta; dan rencana waktu pelaksanaan pengadaannya. Informasi tersebut dicantumkan pada saat penyusunan RKA-KL.

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU. Dalam rangka penyusunan anggaran satker BLU agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada strategi bisnis;
2. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU;
3. RBA disusun berdasarkan :
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat.
4. Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka penyusunan RBA-nya menggunakan standar biaya tersebut, sedangkan

untuk satker BLU yang belum mampu menyusun standar biaya, RBA disusun berdasarkan SBU;

5. Pagu dana pada ikhtisar RBA pada komponen PNPB dan Rupiah Murni (RM) harus sama dengan alokasi anggaran pada pagu sementara.

1.1.6 Keterkaitan Antara Rencana kerja perubahan Dengan Rencana kerja perubahan Kabupaten/Kota

RSJD Atma Husada Mahakam adalah Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Bersifat Khusus (OBK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dimana pada saat penyusunan Rencana kerja perubahan walaupun tidak memiliki UPTD tetapi tetap mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen, termasuk masyarakat di beberapa Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Timur. Contohnya dalam untuk masyarakat yang berada pada daerah yang jangkauan aksesnya sangat jauh dari RSJD Atma Husada Mahakam, untuk pelayanan rawat jalan terkait obat-obatan akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien dan jarak akses sehingga perawatan di rumah tetap dapat dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian persediaan Obat-obatan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasien.

1.1.7 Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Penyusunan Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rencana kerja perubahan, Penyusunan Rencana kerja perubahan, Penyusunan Rencana kerja perubahan, dan Penetapan Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam. Mekanisme dan waktu penyusunan Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam bersinergi dengan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, karena pada dasarnya RKPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan rangkuman dari seluruh Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah yang dikolaborasikan menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam dan hasil evaluasi Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada

Mahakam akan menjadi pedoman bagi RSJD Atma Husada Mahakam dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) RSJD Atma Husada Mahakam pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain :

1.2.1 Undang-undang :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

1.2.2 Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No. 4817);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

1.2.3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

2.2.1 Peraturan Lainnya tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 06 Tahun 2011 tentang Perubahan PERDA No 10 Tahun 2008 tentang SOTK RSJD Prov Kal-Tim;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa daerah Atma Husada Mahakam;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.44/K.620/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

sebagai Badan Layanan Umum Daerah. dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tiur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan di RSJD Atma Husada mahakam.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB VI PENUTUP
- 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja
 - 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - 4.3 Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2021 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan sebanyak 3 (Tiga) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 73.616.930.513,00 (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ratus tiga belas rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 68.645.752.980,47 (Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 93,25%. Pelaksanaan untuk program-program Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung kegiatan dan sub kegiatan :
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan cakupan pelayanan administrasi perkantoran
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perkantoran dengan indikator jumlah bahan belanja bahan bakar minyak genset/dexlite yang diadakan target sebesar 1605 liter, realisasi sebesar 1570 liter dengan capaian sebesar 97,81%.
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah didukung dengan sub kegiatan :
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dengan indikator jumlah bahan bakar kendaraan ambulance/dexlite target

sebesar 138 liter realisasi sebesar 104 liter dengan capaian sebesar 75,36% .

- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program ini mempunyai sasaran yaitu Meningkatnya Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Pada RSJD AHM, dengan indikator ini capaian di tahun 2021 realisasinya sebesar 40,11% dari target sebesar 85% dengan capaian sebesar 47,18 %.
- ❖ Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat didukung dengan kegiatan :
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Nilai ASPAK realisasi sebesar 72,62% dari target 75% dengan capaian sebesar 96%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- ❖ Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat didukung kegiatan dan sub kegiatan :
 - Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi dengan indikator jumlah kegiatan pelayanan kesehatan jiwa realisasi sebesar 3 kegiatan dari target 5 kegiatan dengan capaian sebesar 100%.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus dengan indikator Jumlah survei pelayanan kesehatan jiwa realisasi sebesar 3 survei dari target 3 survei dengan capaian sebesar 100%.
 - Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi dengan sub kegiatan :
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan telah dilakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang telah terealisasi sebanyak 10 unit dengan capaian sebesar 100% dari target yang direncanakan sebanyak 10 unit. Pemeliharaan alat

kesehatan tersebut terdiri dari *X-Ray Flim Viewr, Tensimeter Digital, RTMS, Timbangan Badan, EKG, Nebulizer, Hematologi Analyzer, Microscope, Pulse Oxymeter dan Syring Pump.*

- Sub kegiatan kedua yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang dilakukan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik terealisasi sebanyak 13 Unit dengan capaian sebesar 100% dari target yang direncanakan sebanyak 13 Unit. Alat kesehatan tersebut terdiri dari *tiga unit Nebulizer, lima unit X-Ray Film Viewer dan lima unit Emergency Trolley.*
- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang didukung dengan kegiatan :
- Dari hasil kegiatan diatas Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator jumlah laporan bimtek realisasi sebesar 5 bidang dari target sebesar 5 bidang dengan capaian sebesar 100% di tahun 2021. Dapat dilihat dari pegawai yang mengikuti bimtek yang tersebar dari lima bidang yaitu Bidang Keuangan, Bidang Administrasi, Bidang Pelayanan medis, Bidang Penunjang medis ,dan Bidang Keperawatan.
 - Sub kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan dengan indikator jumlah pegawai yang mengikuti bimtek realisasi sebesar 5 orang dari target 5 orang dengan capaian sebesar 100%.
- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung kegiatan dan sub kegiatan :
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan peyediaan gaji pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu dengan capaian sebesar 100%.

- Sub kegiatan pertama penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target sebesar 14 Dokumen, realisasi sebesar 14 Dokumen dan capaian sebesar 100%.
 - Sub kegiatan kedua penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target sebesar 12 bulan, realisasi 12 bulan dan capaian sebesar 100%.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah salah satu kegiatan yang ada di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan cakupan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian 100
- Didukung dengan sub kegiatan pertama penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor dengan indikator jumlah jenis komponen listrik yang diadakan target sebesar 2 jenis, realisasi sebesar 2 jenis yang terdiri dari alat instalasi listrik dan penerangan dengan capaian sebesar 100%
 - Sub kegiatan kedua penyediaan peralatan dan perkantoran dengan indikator jumlah alat tulis kantor target sebesar 12 bulan realisasi sebesar 12 bulan dengan capaian 100%
 - Sub kegiatan ketiga penyediaan peralatan rumah tangga target sebesar 12 bulan dengan realisasi sebesar 12 bulan dengan capaian sebesar 100%
 - Sub kegiatan keempat penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan indikator jumlah barang cetak dan penggandaan target sebesar 12 bulan, realisasi sebesar 12 bulan dengan capaian 100%.
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan didukung dengan sub kegiatan :
- Sub kegiatan pertama penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator jumlah perangko materai dan benda pos lainnya yang

diadakan target sebesar 300 kali dalam 1 tahun, realisasi sebesar 300 kali dengan capaian sebesar 100%

- Sub kegiatan kedua penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator jumlah bulan pelaksanaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan internet target sebesar 12 bulan realisasi sebesar 12 bulan yang dibayar rutin setiap bulannya dengan capaian sebesar 100%
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah didukung dengan sub kegiatan :
 - Sub kegiatan pertama penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dengan indikator jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan/jabatan yang diperpanjang pajak dan perizinannya target sebesar 25 unit realisasi sebesar 25 unit kendaraan yang dibayarkan pajaknya dengan capaian sebesar 100%.
 - Sub kegiatan kedua penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan target sebesar 25 unit realisasi sebesar 25 unit kendaraan yang dipelihara selama 1 tahun dengan capaian sebesar 100%.
 - Sub kegiatan ketiga Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target sebesar 1 Unit realisasi sebesar 1 unit gedung selama 1 tahun dengan capaian sebesar 100%.
- Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja didukung sub kegiatan :
 - Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator jumlah orang yang mengikuti kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja target sebesar 3 orang realisasi sebesar 3 orang dilakukan secara bertahap selama 1 tahun dengan capaian sebesar 100%

- Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD didukung sub kegiatan :
 - Sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD target sebesar 12 bulan realisasi sebesar 12 bulan yang terdiri dari belanja modal dan belanja operasional untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dengan capaian sebesar 100%.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- ❖ Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Pada program ini mempunyai sasaran program yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa pada RSJD Atma Husada Mahakam dengan indikator Prosentase capaian nilai indikator mutu pelayanan, pada indikator ini realisasi sebesar 94,95 % dari target sebesar 90% dengan capaian sebesar 105.5%
- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program ini mempunyai sasaran yaitu terwujudnya tata kelola manajemen rumah sakit yang baik dengan indikator skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan. Pada indikator ini realisasinya sebesar 88,95 % dari target sebesar 85,67 % dengan capaian sebesar 103,8 %.
- Di kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan ada indikator kegiatan yaitu nilai survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja realisasi sebesar 90,99% dari target 76 dengan capaian sebesar 119,7 %.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Secara umum capaian sasaran kinerja RSJD Atma Husada Mahakam pada tahun 2021 telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan sebuah prestasi sebagai hasil kerja keras dari semua pihak yang berusaha konsisten untuk tetap fokus pada tujuan dan terget yang telah di tetapkan. Namun demikian dalam pencapaian target yang telah ditetapkan masih menemui beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- Kegiatan survei akreditasi dilakukan setiap 3 tahun sekali. RSJD AHM telah dilakukan survei akreditasi oleh KARS pada bulan Juli tahun 2019 dengan

predikat Utama. Selanjutnya dalam rangka mempertahankan capaian akreditasi tersebut akan dilakukan re akreditasi oleh KARS setiap tahun, namun pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi covid 19.

- Kegiatan Terapi keluarga tidak dapat dilakukan karena adanya pemberlakuan PPKM yang membatasi kunjungan pihak rumah sakit kerumah keluarga pasien selama pandemi covid-19 dan hanya dilakukan melalui telpon sehingga tidak terdokumentasi dengan baik. Sedangkan untuk terapi modalitas terutama terapi aktivitas kelompok (TAK) hanya dapat dilakukan mulai dari bulan oktober sampai desember 2021.
- Untuk kegiatan Porkesremen yang diadakan setiap dua tahun sekali juga tidak dapat dilakukan sehubungan dengan keputusan dari RS Jiwa Seluruh Indonesia karena terkendala adanya pandemi COVID-19 yang berdampak ke seluruh dunia dan terjadi juga di Indonesia, sehingga kegiatan yang bersifatnya mengumpulkan orang dalam jumlah banyak tidak dilakukan. Beberapa RS Jiwa milik Pemerintah juga mengalami kendala karena dituntut untuk melakukan rasionalisasi anggaran untuk membantu daerah dalam penanganan COVID-19.
- Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit Pasal 9 bahwa pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi, yang meliputi kegiatan survei akreditasi dan penetapan status akreditasi. Kegiatan survei akreditasi dilakukan setiap 3 tahun sekali. RSJD AHM telah dilakukan survei akreditasi oleh KARS pada bulan Juli tahun 2019 dengan predikat Utama. Selanjutnya dalam rangka mempertahankan capaian akreditasi tersebut akan dilakukan re akreditasi oleh KARS setiap tahun, namun pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi covid 19. Sebagai pengganti dari kegiatan Re akreditasi tersebut Kementerian Kesehatan mewajibkan Rumah Sakit untuk membuat surat pernyataan komitmen mempertahankan mutu oleh pimpinan rumah sakit.
- Untuk sub kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala terkait

nomenklatur yang terdapat didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dimana nomenklatur tidak menyebutkan secara jelas tentang kontribusi pelatihan atau bimtek karena tujuan dari penyediaan anggaran didalam sub kegiatan tersebut untuk keperluan kontribusi pelatihan atau bimtek.

- SHS (Standar Harga Satuan) yang mengakomodir tentang kontribusi pelatihan dan bimtek belum tersedia di SIPD (sistem Informasi Perangkat Daerah) sehingga menyulitkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam ketika melakukan kegiatan pelatihan atau bimtek.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah :

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan sesuai Renstra RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur adalah satu target yang telah ditetapkan baik didalam Renstra maupun Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2021 dimana penyebab yang cukup besar pengaruhnya adalah pandemi Covid-19 yang telah melanda negara Indonesia tidak luput provinsi Kalimantan Timur.

Pandemi ini sangat besar pengaruhnya terutama dalam hal penentuan kebijakan nasional dan daerah terkait anggaran daerah yang terpaksa dilakukan pengurangan anggaran atau refocussing anggaran.

2.1.6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur mengadakan Refocusing anggaran terhadap semua SKPD di bawah nya , dimana sebagian besar anggaran di alihkan ke bidang kesehatan , dalam rangka menanggulangi pandemi Covid 19. RSJD AHM yang di tunjuk sebagai salah satu pusat rujukan RS penanganan Covid 19 di Provinsi Kalimantan Timur, merevisi sejumlah kegiatan serta anggarannya dalam rangka untuk lebih menfokuskan penanganan pandemi ini.

Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan Renja Perubahan dan pencapaian Renstra ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 (T-C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur berikut ini:

TABEL 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Daerah atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN N-1 (NOP 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	0 2		KESEHATAN							
1	0 2	0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun	86,5%	-	86%	86,5%		
1	0 2	0 3	1.0 2	a Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	a Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	5 Bidang	-	5 Bidang	5 Bidang	

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN N-1 (NOP 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0 2 0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	92%	-	90%			92%		
1 0 2 0 2 1.0 1	a Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	a Nilai Aspak	85%	-	75%			85%		
1 0 2 0 2 1.0 2	b Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	b Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan jiwa	9 Laporan	-	3 Laporan			9 Laporan		

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022))	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN N-1 (NOP 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
			Tingkat Daerah Provinsi										
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	86.25%	-	85,67%		86.25%				
1	02	01	1.01 a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	3 Laporan	-	1 Laporan		3 Laporan				
1	02	01	1.02 b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	b Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	100%	-	100%		100%				

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN N-1 (NOP 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0 2 1 1.0 6	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	c cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	100%	-	-	100%		
1 0 2 1 1.0 8	d Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	d Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	77%	-	76%			77%		
1 0 2 1 1.0 9	e Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e Jumlah Kendaraan roda 2 dan 4 yang berfungsi dengan baik dan layak beroperasi	25 Unit	-	25 Unit			25 Unit		
1 0 2 1	f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	f Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	91%	-	0			91%		

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN N-1 (NOP 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0 2 0 1	g Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	g Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Terhadap Kehadiran Tepat Waktu	95%	-	0			95%		
1 0 2 0 1 1.1 0	h Peningkatan Pelayanan BLUD	h Peningkatan pelayanan BLUD	100%	-	100%			100%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 81 tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam pada pasal 2, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan Paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah
3. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA);
4. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian
5. Perumusan, perencanaan pembinaan koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan:
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan medik dan penunjang medik
7. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan keperawatan, penelitian dan pengembangan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Upaya RSJD Atma Husada Mahakam dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai dengan SPM

- Meningkatkan pengelolaan manajemen Rumah Sakit yang transparan dan akuntabel.

2.2.1. Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan sebanyak 12 (dua belas) program strategis dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 23.282.351.280,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu dua ratus delapan puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 19.613.153.355,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 84,24%.

Implikasi yang timbul terhadap tercapainya program dan kegiatan sesuai Renstra RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur adalah tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan baik didalam Renstra maupun Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2020 dimana penyebab yang cukup besar pengaruhnya adalah pandemi Covid-19 yang telah melanda negara Indonesia tidak luput provinsi Kalimantan Timur. Pandemi ini sangat besar pengaruhnya terutama dalam hal penentuan kebijakan nasional dan daerah terkait anggaran daerah yang terpaksa dilakukan pengurangan anggaran atau refocussing anggaran.

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur mengadakan Refocusing anggaran terhadap semua SKPD di bawah nya , dimana sebagian besar anggaran di alihkan ke bidang kesehatan, dalam rangka menanggulangi pandemi Covid 19. RSJD AHM yang di tunjuk sebagai salah satu pusat rujukan RS penanganan Covid 19 di Provinsi Kalimantan Timur, merevisi sejumlah kegiatan serta anggarannya dalam rangka untuk lebih menfokuskan penanganan pandemi ini.

RSJD Atma Husada Mahakam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika. serta zat adiktif lainnya (NAPZA) yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan sebagai OPD. Analisis

Kinerja Pelayanan OPD tersebut merujuk pada **IKK (Indikator Kinerja kunci)** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Secara Nasional RSJD Atma Husada Mahakam memiliki **SPM/Standar Nasional** mutu pelayanan rumah sakit yang harus dipenuhi yang terdiri dari 13 parameter penilaian dimana indikator tersebut merupakan indikator sasaran RSJD Atma Husada Mahakam. 13 parameter **SPM/Standar Nasional** mutu pelayanan rumah sakit tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
SPM/Standar Nasional mutu pelayanan rumah sakit

No	Nama Indikator/Parameter	Standar
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%
2	Kepatuhan penggunaan APD	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%
5	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%
6	Pelaporan hasil krisis laboratorium	100%
7	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥ 80%
8	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%
9	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%
10	Kecepatan waktu tanggap komplain	> 80%
11	Kepuasan pasien	≥ 76.61

Secara lengkap rekapitulasi Analisis Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam disajikan dalam Tabel 2.2 (T-C.30) di bawah ini.

Tabel 2.3 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun N-2 (2020)	Tahun N-1 (2021)	Tahun N (2022)	Tahun N+1 (2023)	Tahun N-2 (2020)	Tahun N-1 (2021)	Tahun N (2022)	Tahun N+1 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Capaian Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	87,41 %		87,41 %	87,5 %	88%	88,5%	87,41 %	95,22%	88%	88,5%	Terdapat 11 Paramater untuk penilaian Capaian Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
2	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan		80%	84%	85,67%	86%	86,25%	86,49%	88,95%	89%	89,5%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Perda No. 06 tahun 2011 adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA)

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan Paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah
3. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA);
4. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian
5. Perumusan, perencanaan pembinaan koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan:
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan medik dan penunjang medik
7. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan keperawatan, penelitian dan pengembangan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang mendasar dan terjadi di rumah sakit serta perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam. Beberapa masalah utama yang akan menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, disisi lain masalah utama tersebut akan memberikan dampak secara positif atau sebagai faktor pendorong.

Isu-isu strategis RSJD Atma Husada Mahakam antara lain:

1. Belum adanya regulasi secara khusus tentang kesehatan jiwa di Provinsi Kaltim.
2. Belum diketahui (pasien gelandangan psikotik).
3. Tingginya stigma masyarakat terhadap ODMK.
4. Belum memadainya sistem informasi dan teknologi.
5. Belum tersosialisasi dan belum dijalankan secara optimal.
6. Belum optimalnya mutu layanan sesuai SPM.
7. Belum terakomodirnya kebutuhan pengembangan pelayanan dalam struktur organisasi.
8. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan.
9. Belum terpenuhinya standar jumlah dan kompetensi SDM.
10. Rendahnya aksesibilitas terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Atma Husada Mahakam, maka organisasi perlu menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara tepat. Agar tujuan dan sasaran strategis dapat dirumuskan secara tepat, diperlukan analisis lingkungan strategis baik yang sifatnya internal dan eksternal. Berikut ini adalah beberapa permasalahan atau hambatan strategis yang telah diidentifikasi, sebagai berikut :

a. Permasalahan Internal :

1. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai SPM
2. Belum optimalnya Pasien safety sesuai SPM
3. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan di bangsal Perawatan belum optimal
4. Masih ada sarana dan prasarana yang belum terpenuhi sesuai ASPAK
5. Implementasi SIM RS kurang optimal karena terbatasnya SDM dan Anggaran
6. Terbatasnya lahan untuk pengembangan layanan kesehatan jiwa
7. Masih terdapat piutang tahun 2008 s/d 2016 pada catatan laporan keuangan yang belum terbayarkan.

b. Permasalahan Eksternal:

1. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK

2. Kurangnya perhatian instansi-instansi terkait terhadap masalah ODGJ dan ODMK

2.3.2. Dampak terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tidak mencantumkan visi dan misi, namun mengikuti visi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yaitu: "BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT".

Berdasarkan arahan Visi Gubernur di atas maka ditetapkan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah yang diarahkan pada aspek-aspek pembangunan sebagai berikut :

- Misi Pertama : Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
- Misi Kedua : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
- Misai Ketiga : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.
- Misi Keempat : Berdaulat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
- Misi Kelima : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

Menelaah ke lima misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut di atas bila dihubungkan dengan pelayanan pada RSJD Atma Husada Mahakam maka keterkaitan yang sangat erat ada pada misi yang pertama yaitu **Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**, dalam hal ini RSJD Atma Husada Mahakam sebagai organisasi perangkat daerah pendukung merumuskan tujuan organisasi yaitu :

- Tujuan 1 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
- Tujuan 2 : Mewujudkan manajemen rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

Tujuan ini dibangun sebagai komitmen RSJD Atma Husada Mahakam guna meningkatkan kualitas hidup seseorang sehingga dapat hidup mandiri dan produktif serta berdaya saing. Tujuan pertama yaitu Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA dicapai melalui beberapa sasaran yaitu :

- 1) Optimalnya kualitas SDM Rumah sakit
- 2) Meningkatnya capaian mutu pelayanan rumah sakit.

Sedangkan tujuan kedua yaitu Mewujudkan manajemen rumah sakit yang transparan dan akuntabel dicapai melalui sasaran yaitu:

- 1) Terlaksanannya pengelolaan manajemen Rumah sakit yang baik.

Dengan adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi RSJD Atma Husada Mahakam jika dikaitkan dengan tujuan RSJD Atma Husada Mahakam yang berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza yang berkualitas untuk mendukung dan ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing sesuai dengan misi pemerintah daerah dapat menemui kendala. Karena untuk menciptakan manusia yang memiliki daya saing tidak cukup hanya memiliki kesehatan fisik saja tetapi juga dibutuhkan kesehatan mental yang optimal.

2.3.3. Dampaknya terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Dalam rangka memperbaiki kemaslahatan umat manusia, PBB telah mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satu bidang dari SDGs yang menjadi sorotan adalah bidang kesehatan, karena akan berdampak langsung pada kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan manusia 12 tahun ke depan yaitu pada tahun 2030.

Isu kesehatan jiwa merupakan salah satu target yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs), namun sering terabaikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setidaknya satu dari empat orang di dunia pernah mengalami masalah kejiwaan sepanjang hidupnya. Sedang di Indonesia menurut Survei Global Health data tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, Hal ini berarti setidaknya ada satu dari sepuluh orang di negara ini sedang mengalami masalah kejiwaan. Membuat Indonesia menjadi negara dengan pengidap gangguan jiwa tertinggi di kawasan Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara dengan pencegahan dan

penanganan gangguan jiwa yang terburuk. Diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.

2.3.4. Tantangan

Terdapat beberapa tantangan penting kedepan yang perlu diperhatikan oleh pihak RSJD Atma Husada Mahakam, antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK .
2. Kurangnya perhatian Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi terhadap masalah kesehatan jiwa.
3. Stigma masyarakat terhadap Rumah Sakit Jiwa yang kurang baik.

2.3.5. Peluang

1. Potensi prevalensi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) meningkat.
2. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa dan napza yang berkualitas.
3. Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain (institusi pendidikan, RS, instansi terkait).
4. Adanya perkembangan dari standar mutu dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan jiwa.
5. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terhadap peningkatan dan pengembangan mutu layanan rumah sakit.
6. Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

2.3.6. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindak Lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Tahun Yang Direncanakan.

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang mendasar dan terjadi di rumah sakit serta perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam. Beberapa masalah utama yang akan menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, disisi lain masalah utama tersebut akan memberikan dampak secara positif atau sebagai faktor pendorong. Aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Aspek Regulasi

Regulasi merupakan hal yang sangat penting karena menjadi pedoman dan pijakan atas pelaksanaan program terkait pelayanan kesehatan jiwa.

Tanpa adanya regulasi, maka suatu kegiatan akan tetap dapat dilaksanakan namun hasil yang dicapai tentunya masih kurang optimal. Berdasarkan analisis penentuan isu-isu strategis yang teridentifikasi di RSJD Atma Husada Mahakam, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Belum adanya regulasi secara khusus tentang kesehatan jiwa di Provinsi Kaltim.

2. Aspek Sosial

Stigma dari masyarakat yang masih negatif terhadap masalah kesehatan jiwa memberikan dampak yang buruk untuk pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK. Masih banyaknya keluarga pasien yang kurang peduli terhadap ODMK. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya pasien yang tidak dapat dipulangkan karena adanya penolakan keluarga dan masyarakat di tempat tinggal pasien atau pasien yang memang keberadaan keluarganya belum diketahui (pasien gelandangan psikotik).

Data pasien yang tidak dapat dipulangkan saat ini di RSJD Atma Husada Mahakam sebanyak 57 pasien. Selain itu juga masih adanya beberapa pasien yang dirawat di RSJD Atma Husada Mahakam yang tidak pernah dijenguk oleh keluarga walaupun keluarga bertempat tinggal di Samarinda. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa. Selain itu juga masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis penentuan isu-isu strategis di RSJD Atma Husada Mahakam, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu Tingginya stigma masyarakat terhadap ODMK.

3. Aspek Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, memberikan dampak secara signifikan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan oleh RSJD Atma Husada Mahakam. Pada prinsipnya kemajuan teknologi perlu diiringi dengan kemampuan SDM untuk pemanfaatan teknologi yang dimaksud.

Saat ini RSJD Atma Husada masih belum memiliki sistem teknologi yang dapat menjadi sumber informasi data terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa secara akurat. Masalah lainnya yaitu belum adanya pengelolaan secara baik terkait dengan sistem informasi kepegawaian.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis yang dapat dirumuskan yaitu Belum memadainya sistem informasi dan teknologi.

4. Aspek Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual. Budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya organisasi itu sendiri merupakan sistem nilai yang mengandung cita-cita organisasi sebagai sistem internal dan sistem eksternal sosial. Terkait dengan budaya kerja RSJD Atma Husada Mahakam telah tertuang ke dalam Pola Tata Kelola yang pada saat ini belum tersosialisasi dan belum dijalankan secara optimal.

Sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada publik, maka RSJD Atma husada Mahakam seharusnya memiliki sistem jaminan mutu layanan. Hal ini terbukti dengan belum optimalnya kinerja dari penjamin mutu internal yang meliputi: komite medik, keperawatan, hukum dan etik, farmasi dan terapi serta pengendalian dan pencegahan infeksi, serta timpatient safety, dan SPI sebagai sistem pengendali internal. Berdasarkan penjelasan diatas maka isu strategis yang dapat dirumuskan yaitu Belum optimalnya mutu layanan sesuai SPM.

5. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan berarti seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku setiap anggota dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai Visi. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kelembagaan RSJD Atma Husada Mahakam saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 06 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kebutuhan kegiatan yang selama dilaksanakan, maka struktur kelembagaan tersebut belum mampu mengakomodir semua kebutuhan yang

perlu dikembangkan di RSJD Atma Husada Mahakam, sehingga isu strategisnya yaitu Belum terakomodirnya kebutuhan pengembangan pelayanan dalam struktur organisasi.

6. Sistem Kerja

Sistem dan prosedur kerja dalam organisasi adalah unsur penting dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang baik, karena keteraturan dan pelaksanaan tugas secara sistematis mempermudah capaian kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi secara fungsional RSJD Atma Husada Mahakambertanggung jawab dalam penataan sistem dan prosedur kerja. Saat ini RSJD Atma Husada Mahakam telah memiliki standar pelayanan yang meliputi SPM dan SPO untuk semua unit pelayanan.

Walaupun standar pelayanan sudah ditetapkan, pada penerapannya masih banyak kendala diantaranya belum semua staf memahami teknis penerapan SPO, selain itu RSJD Atma Husada belum memiliki kemampuan dalam pencapaian SPM. Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis yang dirumuskan yaitu Belum optimalnya penerapan standar pelayanan.

7. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional dibidang kesehatan. Tujuan adanya manajemen SDM di suatu instansi adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi terdistribusi secara adil,serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan adalah upaya pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitasnya yang telah direncanakan serta peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Permasalahan yang ada yaitu kuantitas SDM belum memenuhi standar berdasarkan PMK 340 tahun 2010, kompetensi dari SDM yang sudah tersedia belum, selain itu juga belum memiliki sistem kediklatan yang

terstandar, sehingga pengembangan SDM sesuai dengan bidang keilmuannya belum optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis yang dirumuskan adalah Belum terpenuhinya standar jumlah dan kompetensi SDM.

8. *Accessibilitas yang rendah terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa.*

Peningkatan masalah kesehatan jiwa memberikan dampak terhadap kebutuhan akan pelayanan kesehatan jiwa juga semakin meningkat. Jangkauan pelayanan kesehatan jiwa harus dapat mencapai masyarakat yang jauh dan bukan hanya yang bertempat tinggal di kota besar saja. Hal ini merupakan upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Upaya ini tidak mungkin bisa dilaksanakan jika pelayanan kesehatan jiwa hanya diberikan oleh pihak RSJD Atma Husada Mahakam saja.

Berdasarkan piramida pemberi pelayanan kesehatan jiwa seharusnya semua pihak terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa, baik formal dan non formal dan berasal dari instansi pemerintah ataupun swasta. Pelayanan kesehatan jiwa yang memadai yang dapat menjangkau seluruh masyarakat belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh: Jumlah tenaga kesehatan jiwa masih sangat terbatas.

Masalah kesehatan jiwa sering kali bermanifestasi dalam bentuk keluhan fisik, sehingga tidak terdeteksi dan tidak teratasi dengan baik. Pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa masih kurang dan stigma terhadap gangguan jiwa masih besar, sehingga mereka tidak datang ke pelayanan kesehatan jiwa, tapi banyak yang pergi ke pengobatan tradisional atau pemuka agama.

Penduduk pedesaan (rural) sulit menjangkau fasilitas kesehatan jiwa dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Adanya otonomi daerah yang membuat daerah menjadi penentu kebutuhan masing-masing, menyebabkan masalah pelayanan kesehatan jiwa belum tentu dianggap sebagai kebutuhan prioritas. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis yang dirumuskan adalah Rendahnya aksesibilitas terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa.

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Dari Rencana Kerja yang telah disusun pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja rumah sakit. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2022 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja Perubahan, perlu dilakukan review terhadap RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur dan telah sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Perubahan dengan 3 nomenklatur program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

TABEL 2.4 (T-C 31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD PERUBAHAN TAHUN 2022
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nama Perangkat Daerah : RSJD Atma Husada Mahakam

Lembar 1 dari 6

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun	86%	7,290,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun	86%	7,290,000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	5 Bidang	7,290,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	5 Bidang	7,290,000	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Samarinda	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	6 Orang	7,290,000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Samarinda	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	6 Orang	7,290,000	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Samarinda	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	91%	19,160,181,396	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Samarinda	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	91%	19,160,181,396	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP	Samarinda	Jumlah Laporan pelayanan	3 Laporan	168,365,000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP	Samarinda	Jumlah Laporan pelayanan	3 Laporan	168,365,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		kesehatan jiwa			Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		kesehatan jiwa			
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Samarinda	Jumlah Survei Pelayanan Kesehatan Jiwa	7 Kegiatan	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Samarinda	Jumlah Survei Pelayanan Kesehatan Jiwa	7 Kegiatan	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Samarinda	Jumlah Linen Yang Diadakan Jumlah set pakaian yang diadakan	217 lembar 110 set	168,365,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Samarinda	Jumlah Linen Yang Diadakan Jumlah set pakaian yang diadakan	217 lembar 110 set	168,365,000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	80%	18,991,816,396	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	80%	18,991,816,396	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis alat kesehatan dan penunjang medik rumah sakit yang diadakan	4 jenis	16,898,720,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis alat kesehatan dan penunjang medik rumah sakit yang diadakan	4 jenis	16,898,720,000	
	Pengadaan Barang penunjang operasional rumah sakit	Samarinda	Jumlah AC yang diadakan Jumlah Kursi Kerja yang diadakan	24 Unit 40 Unit	660,766,000	Pengadaan Barang penunjang operasional rumah sakit	Samarinda	Jumlah AC yang diadakan Jumlah Kursi Kerja yang diadakan	24 Unit 40 Unit	660,766,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Meubeler yang diadakan	73 Unit				Jumlah Meubeler yang diadakan	73 Unit		
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara	351 Unit	0	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara	351 Unit	0	
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	1 fasilitas	1,432,330,396	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	1 fasilitas	1,432,330,396	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	86%	91,109,778,808	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	86%	91,109,778,808	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	1 Laporan	18,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	1 Laporan	18,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Dalam Upaya	2 Orang	18,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Dalam Upaya	2 Orang	18,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Kinerja					Peningkatan Kualitas Kinerja			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	100 %	29,377,503,120	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	100 %	29,377,503,120	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	29,162,463,120	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	29,162,463,120	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD yang dibayarkan	12 Bulan	141,840,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD yang dibayarkan	12 Bulan	141,840,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi dan Reviuw Klaim Yankes Jumlah orang yang melakukan perjalana dinas (luar daerah) dalam rangka	18 OP 3 OP	73,200,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi dan Reviuw Klaim Yankes Jumlah orang yang melakukan perjalana dinas (luar daerah) dalam rangka	18 OP 3 OP	73,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			verifikasi dan review klaim yankes					verifikasi dan review klaim yankes			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Pendampingan dan Audit Internal Terhadap Draft Laporan Keuangan (APBD & BLUD)	2 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Pendampingan dan Audit Internal Terhadap Draft Laporan Keuangan (APBD & BLUD)	2 Laporan	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	526,700,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	526,700,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan	2 Jenis	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan	2 Jenis	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis ATK yang diadakan	55 Jenis	182,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis ATK yang diadakan	55 Jenis	182,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah jenis peralaan kebersihan dan bahan pembersih rumah sakit yang diadakan	21 Jenis	344,700,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah jenis peralaan kebersihan dan bahan pembersih rumah sakit yang diadakan	21 Jenis	344,700,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pengisian tabung gas LPG yang diadakan	120 Tabung				Jumlah pengisian tabung gas LPG yang diadakan	120 Tabung		
			Jumlah pengisian tabung pemadam yang diadakan	60 Tabung				Jumlah pengisian tabung pemadam yang diadakan	60 Tabung		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	260000 Lem bar	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	260000 Lem bar	0	
			Jumlah Pengadaan/Foto Copy yang diadakan	0				Jumlah Pengadaan/Foto Copy yang diadakan	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	77 %	12,669,601,640	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	77 %	12,669,601,640	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Bulan jasa Paket Pengiriman Yang Diadakan	12 bulan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Bulan jasa Paket Pengiriman Yang Diadakan	12 bulan	0	
			Jumlah perangko materai pos lain yang diadakan	1300 Lembar				Jumlah perangko materai pos lain yang diadakan	1300 Lembar		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah bulan tagihan belanja kawat/faksimili/int	12 bulan	1,987,835,616	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah bulan tagihan belanja kawat/faksimili/int	12 bulan	1,987,835,616	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ernet/TV kabel/TV satelit					ernet/TV kabel/TV satelit			
			Jumlah tagihan air dalam setahun	49776 M3				Jumlah tagihan air dalam setahun	49776 M3		
			Jumlah tagihan listrik dalam setahun	984000 Kwh				Jumlah tagihan listrik dalam setahun	984000 Kwh		
			Jumlah tagihan telepon	18000 Pulsa				Jumlah tagihan telepon	18000 Pulsa		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan gaji non ASN	12 Bulan	10,681,766,024	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan gaji non ASN	12 Bulan	10,681,766,024	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Kendaraan roda 2 dan 4 yang berfungsi dengan baik dan layak beroperasi	25 Unit	76,835,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Kendaraan roda 2 dan 4 yang berfungsi dengan baik dan layak beroperasi	25 Unit	76,835,800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah bahan bakar minyak non subsidi (ron 90) partaite yang diadakan	9788 Liter	76,835,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah bahan bakar minyak non subsidi (ron 90) partaite yang diadakan	9788 Liter	76,835,800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Samarinda	Jumlah kendaraan	25 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Samarinda	Jumlah kendaraan	25 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dinas/operasional lapangan yang dipelihara			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dinas/operasional lapangan yang dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan	1 Gedung	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan	1 Gedung	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	91 %	1,191,363,870	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	91 %	1,191,363,870	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	2 Unit	996,693,280	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	2 Unit	996,693,280	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	194,670,590	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	194,670,590	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Terhadap Kehadiran Tepat	95 %	480,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Terhadap Kehadiran Tepat	95 %	480,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Waktu					Waktu			
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang diadakan	595 Stel	480,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang diadakan	595 Stel	480,000,000	
	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Presentase Pendapatan Terhadap Target	100 %	46,769,774,378	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	1 Laporan	46,769,774,378	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah bulan belanja pelayanan dan pendukung pelayanan	12 Bulan	46,769,774,378	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah bulan belanja pelayanan dan pendukung pelayanan	12 Bulan	46,769,774,378	
TOTAL					110,277,250,204	TOTAL					110,277,250,204

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Revisi RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2019-2023. Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, RSJD Atma Husada Mahakam dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, RSJD Atma Husada Mahakam dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan jiwa.

Sesuai dengan isu-isu strategis yang di dapat pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu disusun langkah-langkah berupa program dan kegiatan yang dapat membantu mengatasi semua permasalahan atau isu-isu yang ada. Selain dengan menginventarisir semua kebutuhan yang diperlukan dari pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan yang timbul, RSJD Atma Husada Mahakam juga menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat pengunjung rumah sakit sebagai bahan masukan untuk rencana program dan kegiatan.

Tabel 2.5 (T-C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	7
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun	86%	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	5 Bidang	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Samarinda	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	6 Orang	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Samarinda	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	91%	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Laporan pelayanan kesehatan jiwa	3 Laporan	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Samarinda	Jumlah Linen Yang Diadakan Jumlah set pakaian yang diadakan	217 lembar 110 set	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	80%	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis alat kesehatan dan penunjang medik rumah sakit yang diadakan	4 jenis	
	Pengadaan Barang penunjang operasional rumah sakit	Samarinda	Jumlah AC yang diadakan Jumlah Kursi Kerja yang diadakan Jumlah Meubeler yang diadakan	24 Unit 40 Unit 73 Unit	
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	1 fasilitas	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	86%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	1 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja	2 Orang	

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	100 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD yang dibayarkan	12 Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi dan Reviuw Klaim Yankes Jumlah orang yang melakukan perjalana dinas (luar daerah) dalam rangka verifikasi dan review klaim yankes	18 OP 3 OP	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis ATK yang diadakan	55 Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah jenis peralaan kebersihan dan bahan pembersih rumah sakit yang diadakan Jumlah pengisian tabung gas LPG yang diadakan Jumlah pengisian tabung pemadam yang diadakan	21 Jenis 120 Tabung 60 Tabung	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	77 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah bulan tagihan belanja kawat/faksimili/internet/TV kabel/TV satelit Jumlah tagihan air dalam setahun Jumlah tagihan listrik dalam setahun Jumlah tagihan telepon	12 bulan 49776 M3 984000 Kwh 18000 Pulsa	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan gaji non ASN	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Kendaraan roda 2 dan 4 yang berfungsi dengan baik dan layak beroperasi	25 Unit	

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah bahan bakar minyak non subsidi (ron 90) partaite yang diadakan	9788 Liter	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	91 %	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	2 Unit	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Terhadap Kehadiran Tepat Waktu	95 %	
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang diadakan	595 Stel	
	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	1 Laporan	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah bulan belanja pelayanan dan pendukung pelayanan	12 Bulan	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia

Menurut UU No. 18 tahun 2014, upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Sedangkan upaya rehabilitatif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi operasional, serta mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Dalam melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, Kementerian Kesehatan menyoal pada kemudahan akses agar masyarakat tidak hanya bisa ditangani di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas. Dr. Fidiansjah menyatakan untuk saat ini, sudah ada beberapa daerah yang memiliki psikolog klinis di puskesmas. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah psikolog klinis yang terdapat di tiap daerah, Kemenkes berupaya melakukan pendelegasian wewenang kepada dokter dan tenaga perawat untuk melakukan pertolongan pertama kepada ODGJ. Dokter dan tenaga perawat diberikan sebuah workshop agar ilmu dari tenaga profesi rumah sakit jiwa dapat tersalurkan, mampu untuk menangani masalah kejiwaan, dan mempercepat proses intervensi sebelum terlambat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah :

1. pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. pemberdayaan masyarakat dan daerah.
3. pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan.
4. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
5. penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikosis). Angka pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.

Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa berdasarkan asas keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta non diskriminasi.

Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia saat ini semakin perlu diperhatikan. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 dari 1000 Rumah Tangga terdapat anggota keluarga dengan Skizofrenia/Psikosis. Lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional, lebih dari 12 juta orang berusia diatas 15 tahun diperkirakan mengalami depresi. Kondisi ini telah menyerap dana BPJS Kesehatan sebesar 730 miliar.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif juga terus dilakukan. Keempat upaya tersebut harus memerhatikan 4 aspek yaitu fisik, mental, sosial dan spiritual guna mencapai individu sehat jiwa.

Berdasarkan hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2018, Indonesia memiliki prevalensi rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis sebesar 7 per 1.000, artinya setiap 1000 penduduk Indonesia, terdapat 7 kasus penderita skizofrenia. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 yang berkisar di angka 1,7 per 1.000. Selain itu, prevalensi gangguan emosional pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun pada tahun 2018 mencapai 9,8%, angka ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebelumnya sebesar 6%. Peningkatan masalah kesehatan jiwa ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kesehatan jiwa masyarakat Indonesia. Upaya bersama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa, pemerintah telah melakukan revisi terhadap UU No. 18 Tahun 2014 yang dijadikan sebagai landasan utama mengenai aturan kesehatan jiwa di Indonesia. Pada pasal satu dijelaskan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. UU No. 18 Tahun 2014 ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik, serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya promotif dan preventif termasuk dalam upaya pencegahan. Sedangkan upaya pengobatan, berupa upaya kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2014, upaya promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Upaya promotif bertujuan agar kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan jiwa dapat meningkat. Sedangkan upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Menurut Riskesdas tahun 2018, dari total penduduk berumur lebih dari 15 tahun yang mengalami depresi, hanya 9% yang melakukan pengobatan. Stigma atau anggapan negatif menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia enggan berkonsultasi ke psikolog/psikiater.

Sejak tahun 2016 lalu, pemerintah mulai menjadikan tindakan preventif sebagai fokus utamanya. Pemerintah bersama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mulai memberikan edukasi mengenai cara menjadi ibu hamil yang tangguh, baik secara fisik

maupun emosional sang ibu selama mengandung. Tidak hanya itu, disediakan pula konseling pra-nikah, edukasi parenting, hingga penyuluhan program yang berfokus kepada sekolah. Program yang berfokus pada sekolah dilakukan melalui guru konseling atau BK, umumnya konselin tersebut mengenai tindakan perundungan (bullying), seksual, dan sebagainya yang dilaporkan dengan rapor kesehatan.

Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam untuk tahun 2019 - 2023 disusun untuk mendukung pencapaian upaya pelayanan dibidang kesehatan, terutama dibidang kesehatan jiwa dan napza. Kebijakan nasional yang telah dirumuskan tersebut kemudian menjadi acuan untuk perumusan kebijakan pemerinatah Provinsi Kalimantan Timur dan akhirnya menjadi pedoman pula dalam penentuan kebijakan SKPD kesehatan. Pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur kebijakan yang di ambil adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Diklat bagi SDM sesuai kompetensinya
2. Memfasilitasi peningkatan, pemeliharaan dan pemerataan jumlah sarana dan prasarana yang standar.
3. Memfasilitasi ketersediaan SOP dan pelaksanaanya.
4. Memfasilitasi tersedianya fasilitas administrasi perkantoran.
5. Memfasilitasi upaya pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
2. Meningkatkan pengelolaan manajemen Rumah sakit yang transparan dan Akuntabel

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun kedepan, adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA adalah :

1. Optimalnya kualitas SDM Rumah Sakit
2. Meningkatnya capaian mutu pelayanan Rumah Sakit

Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan yang kedua yaitu Meningkatkan pengelolaan manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel adalah:

1. Terselenggaranya Pengelolaan manajemen Rumah Sakit yang baik.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim. Penyusunan Rencana kerja perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2022 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Rencana kerja perubahan, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan 3 nomenklatur program yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Menelaah ke lima misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bila dihubungkan dengan pelayanan pada RSJD Atma Husada Mahakam maka keterkaitan yang sangat erat ada pada misi yang pertama yaitu Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, dalam hal ini RSJD Atma Husada Mahakam sebagai organisasi perangkat daerah pendukung merumuskan tujuan organisasi yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA

Tujuan 2 : Mewujudkan manajemen rumah sakit yang transparan dan

akuntabel.

Tujuan ini dibangun sebagai komitmen RSJD Atma Husada Mahakam guna meningkatkan kualitas hidup seseorang sehingga dapat hidup mandiri dan produktif serta berdaya saing. Tujuan pertama yaitu Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA dicapai melalui beberapa sasaran yaitu :

- 1) Optimalnya kualitas SDM Rumah sakit
- 2) Meningkatnya capaian mutu pelayanan rumah sakit.

Sedangkan tujuan kedua yaitu Mewujudkan manajemen rumah sakit yang transparan dan akuntabel dicapai melalui sasaran yaitu:

- 1) Terlaksanannya pengelolaan manajemen Rumah sakit yang baik.

Dengan adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi RSJD Atma Husada Mahakam jika dikaitkan dengan tujuan RSJD Atma Husada Mahakam yang berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza yang berkualitas untuk mendukung dan ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing sesuai dengan misi pemerintah daerah dapat menemui kendala. Karena untuk menciptakan manusia yang memiliki daya saing tidak cukup hanya memiliki kesehatan fisik saja tetapi juga dibutuhkan kesehatan mental yang optimal.

Dalam rangka memperbaiki kemaslahatan umat manusia PBB telah mencanangkan *Sustainable Development Goals (SDG)* yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satu bidang dari SDG yang menjadi sorotan adalah bidang kesehatan, karena akan berdampak langsung pada kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan manusia 12 tahun ke depan yaitu pada tahun 2030.

Salah satu target yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs), namun sering terabaikan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setidaknya satu dari empat orang di dunia pernah mengalami masalah kejiwaan sepanjang hidupnya. Sedang di Indonesia menurut Survei Global Health data tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, Hal ini berarti setidaknya ada satu dari sepuluh orang di negara ini sedang mengalami masalah kejiwaan. Membuat Indonesia menjadi negara dengan pengidap gangguan jiwa tertinggi di kawasan Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara dengan pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang terburuk.

diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.

RSJD Atma Husada Mahakam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan sebagai OPD. Analisis Kinerja Pelayanan OPD tersebut merujuk pada **IKK (Indikator Kinerja kunci)** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Secara Nasional RSJD Atma Husada Mahakam memiliki **SPM/Standar Nasional** mutu pelayanan rumah sakit yang harus dipenuhi yang terdiri dari 13 parameter penilaian dimana indikator tersebut merupakan indikator sasaran RSJD Atma Husada Mahakam.

4.1.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah 3 (Tiga) program, 11 (Sembilan) kegiatan, dan 18 (lima belas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dengan kegiatannya yaitu :
 - a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat, melalui sub kegiatannya :
 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - b. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - 2) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
 - 3) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, melalui sub kegiatan :
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, melalui sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya
 - h. Peningkatan pelayanan BLUD, melalui sub kegiatan :
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RSJD Atma Husada Mahakam sebagian besar dilaksanakan di Samarinda, kecuali beberapa kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia direncanakan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. RSJD Atma Husada Mahkam berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, tidak membatasi dari golongan mana saja, sehingga kelompok sasaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan RSJD Atma Husada Mahakam adalah konsumen dan karyawan RSJD Atma Husada Mahakam.

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp. 110,277,250,204,- yang bersumber dari APBD dan BLUD Provinsi Kalimantan Timur.

4.1.3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2022 telah selaras dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.4 (T-C 31) yaitu review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan RSJD Atma Husada Mahakam telah sesuai.

Tabel 4.1 (T-C 33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : RSJD Atma Husada Mahakam

Lembar ke 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun	Samarinda	86%	7,290,000	APBD		86%	1,000,000,000
1 02 03 1 02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	Samarinda	5 Bidang	7,290,000	APBD		91%	1,000,000,000
1 02 03 1 02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Samarinda	6 Orang	7,290,000	APBD			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	5 Orang	1,000,000,000
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	Samarinda	91%	19,160,181,396	APBD		91%	8,283,254,167
1 02 02 1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pelayanan kesehatan jiwa	Samarinda	3 Laporan	168,365,000	APBD		87,5%	950,000,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	
1	02	02	1	02	15	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah Survei Pelayanan Kesehatan Jiwa	Samarinda	7 Kegiatan	0	APBD			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	9 Dokumen	250,000,000
1	02	02	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Linen Yang Diadakan	Samarinda	217 lembar	168,365,000	APBD			
							Jumlah set pakaian yang diadakan		110 set					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	1 Dokumen	700,000,000
1	02	02	1	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	Samarinda	80%	18,991,816,396	APBD		87,5%	7,333,254,167
1	02	02	1	01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis alat kesehatan dan penunjang medik rumah sakit yang diadakan	Samarinda	4 jenis	16,898,720,000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	1 Unit	4,264,621,289
1	02 02 1 01 17	Pengadaan Barang penunjang operasional rumah sakit	Samarinda	24 Unit 40 Unit 73 Unit	660,766,000	APBD			
		Jumlah Meubeler yang diadakan							
		Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	52 Unit	400,000,000
1	02 02 1 01	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	351 Unit	0	APBD			
		Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara							
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	300 Unit	381,000,000
		Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	1 fasilitas	1,432,330,396	APBD			
		Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	1 Unit	2,287,632,878						
1	02	01												
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	Samarinda	86%	91,109,778,808	APBD	86%	69,484,113,599					
1	02	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	Samarinda	1 Laporan	18,000,000	APBD		78 Skor	79,590,000
1	02	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja	Samarinda	2 Orang	18,000,000	APBD			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	5 Laporan	79,590,000
1	02	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	Samarinda	100 %	29,377,503,120	APBD		78 Skor	27,306,586,000
1	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	14 Dokumen	29,162,463,120	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	2296 Orang/Bulan	26,753,226,000
1	02 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 Bulan	141,840,000	APBD			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	12 Dokumen	367,560,000
1	02 01 1 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	18 OP	73,200,000	APBD			
		Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas (luar daerah) dalam rangka verifikasi dan review klaim yankes		3 OP					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan	9 Dokumen	100,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Verifikasi Keuangan SKPD				Kepmen 50			
1	02 01 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	2 Laporan	0	APBD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	2 Laporan	85,000,000	
1	02 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	100 %	526,700,000	APBD	78 Skor	1,026,569,465	
1	02 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	2 Jenis	0	APBD			
		Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan				Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	1 Paket	195,500,000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
1	02 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	55 Jenis	182,000,000	APBD			
		Jumlah jenis ATK yang diadakan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	3 Paket	301,699,465
1	02 01 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	21 Jenis	344,700,000	APBD			
		Jumlah jenis peralaan kebersihan dan bahan pembersih rumah sakit yang diadakan							
		Jumlah pengisian tabung gas LPG yang diadakan		120 Tabung					
		Jumlah pengisian tabung pemadam yang diadakan		60 Tabung					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	3 Paket	376,950,000
1	02 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	260000 Lembar	0	APBD			
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan							
		Jumlah Pengadaan/Foto Copy yang diadakan		0					
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	2 Paket	152,420,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	
1	02	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	Samarinda	77 %	12,669,601,640	APBD		78 Skor	10,837,289,672
1	02	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan jasa Paket Pengiriman Yang Diadakan Jumlah perangko materai pos lain yang diadakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 bulan 1300 Lembar	0	APBD		12 Laporan	45,000,000
1	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan belanja kawat/faksimili/internet/TV kabel/TV satelit Jumlah tagihan air dalam setahun Jumlah tagihan listrik dalam setahun Jumlah tagihan telepon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air	Samarinda	12 bulan 49776 M3 984000 Kwh 18000 Pulsa	1,987,835,616	APBD		12 Laporan	1,302,893,840

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		dan Listrik yang Disediakan							
1	02 01 1 08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	12 Bulan	10,681,766,024	APBD			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	12 Laporan	9,489,395,832
1	02 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	25 Unit	76,835,800	APBD		78 Skor	8,532,428,462
1	02 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	9788 Liter	76,835,800	APBD			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	16 Unit	290,600,000
1	02 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	25 Unit	0	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	9 Unit	81,361,900					
1	02	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Samarinda	1 Gedung	0	APBD			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi						Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	4 Unit	8,160,466,562
1	02	01	1	09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	Samarinda	91 %	1,191,363,870	APBD		78 Skor	1,571,050,000
1	02	01	1	09		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Samarinda	2 Unit	996,693,280	APBD			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan Yang Disediakan							2 Unit	630,400,000
						Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Samarinda	9 Unit	194,670,590	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	32 Unit	940,650,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Terhadap Kehadiran Tepat Waktu	Samarinda	95 %	480,000,000	APBD	78 Skor	630,600,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang diadakan	Samarinda	595 Stel	480,000,000	APBD			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	1 Paket	630,600,000	
1	02 01 1 10	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	100 %	46,769,774,378	BLUD	78 Skor	19,500,000,000	
1	02 01 1 10 01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Samarinda	12 Bulan	46,769,774,378	BLUD			
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				Indikator Sub Keg. 2023 Menggunakan Kepmen 50	25 Unit Kerja	19,500,000,000	
TOTAL RENJA APBD DAN BLUD			110,277,250,204				TOTAL	78,767,367,767	



BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana kerja perubahan 2022

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2022 harus menerangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabilitas.

Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai oleh rumah sakit sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang kesehatan.

Adanya Rencana kerja perubahan ini diharapkan agar RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sehingga didalam penyusunan Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2022 harus menyesuaikan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Diharapkan ke depan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mampu mengatasi kendala-kendala yang timbul di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa,

baik berbagai kendala intern rumah sakit maupun kendala yang dirasakan masyarakat sebagai konsumen layanan kesehatan jiwa, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan RSJD Atma Husada Mahakam antara lain :

1. Mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai SPM.
2. Mengoptimalkan capaian Pasien safety sesuai SPM.
3. Mengoptimalkan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan di bangsal Perawatan
4. Berupaya memenuhi Jumlah SDM sesuai klasifikasi rumah sakit kelas A.
5. Mengoptimalkan peningkatan kompetensi SDM Rumah sakit.
6. Berupayan memenuhi target SPM.
7. Mengoptimalkan Implementasi SIMRS
8. Pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai SPM.
9. Mengoptimalkan pengendalian Sistem - AKIP di Rumah Sakit .
10. Berkoordinasi lebih intens untuk penagihan piutang Rumah Sakit yang belum dibayar.
11. Meningkatkan edukasi kepada keluarga untuk meningkatkan keperdulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK
12. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi stigma masyarakat terhadap rumah sakit jiwa yang kurang baik.

Semoga Rencana kerja perubahan RSJD Atma Husada Mahakam ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun Anggaran 2022.

Samarinda, 2022

Plt Direktur,
RSJD Atma Husada Mahakam



Syahrani S.Sos., M.Si
NIP. 196808101990031017